

DELIK HUKUM

Indonesia dan China Perkuat Kerja Sama Digital untuk Pemberdayaan Perempuan melalui MoU KADIN dan IWAPI

Updates. - [DELIKHUKUM.ID](https://delikhukum.id)

Jan 15, 2025 - 15:19



JAKARTA - Dalam peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-China, kolaborasi strategis terjalin antara kedua negara melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan Ikatan Wanita Pengusaha [Indonesia](https://delikhukum.id) (IWAPI), Selasa (07/01/2025).

Perwakilan KADIN, Tatyana Sentani Sutara, SE., M.Si., selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), menegaskan pentingnya kerja sama ini untuk mendukung pengembangan perempuan generasi Z di Indonesia.

“MoU ini bertujuan memanfaatkan sumber daya bersama guna mendukung pengembangan pendidikan, sumber daya manusia, dan pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Tatyana sesuai penandatanganan.



Kerja sama ini meluncurkan program inovatif, seperti kuliah tamu dengan pemimpin industri, pelatihan kewirausahaan, pelatihan perdagangan lintas batas dan ekspor, transformasi digital, hingga program penempatan kerja. Forum Ekonomi Regional juga dirancang untuk mempertemukan perempuan muda dengan pembuat kebijakan dan pelaku bisnis. Selain itu, beasiswa, hibah pendidikan, dan program pertukaran internasional akan memperluas wawasan generasi muda perempuan, membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di pasar global.

Ketua Umum IWAPI, Ir. Nita Yudi, MBA., menyampaikan, “Kerja sama ini menunjukkan komitmen kedua negara dalam pemberdayaan perempuan, khususnya melalui pendidikan kewirausahaan dan digital. Program ini dirancang dengan pendekatan **Training of Trainers (ToT)**, sehingga manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak perempuan muda, termasuk di daerah pedesaan.”

Fokus pada Mengurangi Kesenjangan Digital

Inisiatif ini juga bertujuan mengatasi kesenjangan digital antara perempuan dan laki-laki, sebagaimana diungkapkan dalam survei Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Meski sekitar 78% populasi Indonesia telah menggunakan internet, akses perempuan masih sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Untuk itu, regulasi yang mendukung perempuan dalam memanfaatkan teknologi menjadi sangat penting.

Jurika Fratiwi, SH., SE., MM., Ketua Komite Tetap Perlindungan Hak Anak dan Perempuan PPA KADIN, menambahkan, “Pendidikan digital harus menyentuh perempuan dari berbagai generasi, termasuk lanjut usia di pedesaan. Mereka juga perlu mengembangkan keterampilan digital untuk meningkatkan kualitas hidup.”

Mendukung SDGs dan Partisipasi Perempuan

Kesetaraan gender menjadi prioritas dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan target 50:50 pada tahun 2030. Ninies Wahyudiono, Ketua Komtap Pengembangan SDM PPA KADIN, menyoroti pentingnya pendidikan digital bagi perempuan di pedesaan untuk berperan aktif dalam isu-isu sosial, seperti pendidikan anak dan perubahan iklim.

Damayanti Hakim Tohir, SE., Ketua Komtap Akses Permodalan PPA KADIN, juga menekankan bahwa pemberdayaan digital mendorong inovasi dan kepemimpinan perempuan dalam teknologi dan bisnis. Sementara itu, Nana Cidharta, Ketua Komtap Akses Pemasaran PPA KADIN, menyoroti tantangan akses internet di pedesaan dan pentingnya literasi digital untuk membuka peluang pasar yang lebih luas.

Kerja sama ini diharapkan menciptakan masyarakat inklusif, setara, dan berdaya, di mana perempuan memiliki akses dan keterampilan digital untuk meningkatkan potensi diri mereka, khususnya di wilayah pedesaan. (***)